

EVALUASI RENJA

BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

2021






Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2021 Bappeda Provinsi Lampung dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2021 ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas, penyusunan Laporan Hasil Rencana Kerja Tahun 2021 menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja berdasarkan Renstra Bappeda 2019-2024, sekaligus menjadi instrument untuk memacu perbaikan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung periode berikutnya.

Semoga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan memacu pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.

KEPALA BAPPEDA,

dto

Ir. MULYADI IRSAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011




Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan DPA Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Perubahan Provinsi Lampung T.A. 2021, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar Rp. 31.982.150.950,- terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.29.218.322.040,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.763.828.910,-. Melalui anggaran tersebut BAPPEDA melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 49 Subkegiatan yang terbagi kedalam 2 Sasaran Utama dan 1 Sasaran Pendukung. Untuk 2 Sasaran Utama terdiri 2 program, 6 kegiatan dan 30 subkegiatan dengan total anggaran Rp. 6.825.054.830,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.730.138.900,- atau 83,96% dan 1 Sasaran Pendukung terdiri dari 1 program, 7 kegiatan, dan 19 subkegiatan dengan total anggaran Rp. 25.157.096.120,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.521.905.498,- atau 93,5%. Secara keseluruhan persentase antara pagu anggaran dan realisasi tahun 2021 adalah sebesar 91,46%.

Adapun untuk kinerja tahun 2021, BAPPEDA Provinsi Lampung melaksanakan 13 kegiatan dengan 49 subkegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 99,49%. Dari 49 subkegiatan itu terdapat 45 subkegiatan yang mencapai 100% dan 4 subkegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 90,29%. Dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut Bappeda Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kualitas perencanaan guna mendukung pelaksanaan *good governance* atau pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Bandar Lampung, Februari 2022



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel dan Daftar Gambar.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANTARA RENSTRA DAN RENJA.....	6
2.1 Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021.....	6
2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021 dengan Renstra 2019-2024.....	14
2.3 Kesesuaian Alokasi Pendanaan di DPA dan Renja.....	18
2.4 Perbandingan Indikator dan Target Kinerja antara Renstra dan DPA BAPPEDA Tahun 2021.....	19
BAB III. CAPAIAN KINERJA.....	26
3.1 Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD Tahun 2021	26
3.2 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2021.....	29
3.3 Capaian Kinerja Sasaran Renstra.....	39
BAB IV. HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	55
4.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021.....	55
4.2 Rekomendasi berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan BAPPEDA Tahun 2021..	56
BAB V. PENUTUP.....	58
LAMPIRAN	




Daftar Tabel

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja.....	7
Tabel 2.2	Persandingan antara Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renja Tahun 2021 dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024.....	14
Tabel 2.3	Perbandingan Pendanaan di Renja dan DPA Tahun 2021.....	19
Tabel 2.4	Perbandingan Indikator dan Target Kinerja DPA dan Renja Tahun 2021.....	20
Tabel 3.1	Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD/DPA Tahun 2021	26
Tabel 3.2	Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021....	40



Daftar Gambar

Gambar 2.1	Indikator Kinerja BAPPEDA 2019-2024.....	6
Gambar 2.2	Pohon Kinerja BAPPEDA.....	8
Gambar 2.3	Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2021.....	10
Gambar 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Pendukung.....	11
Gambar 2.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Utama 1.....	12
Gambar 2.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Utama 2.....	13
Gambar 2.7	Pendanaan antara Renja dan DPA Tahun 2021.....	18
Gambar 3.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.....	30




Bab I. Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Dokumen Evaluasi Renja merupakan dokumen laporan hasil perencanaan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Memperhatikan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur Lampung dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, disatu sisi, pelaksanaan program dan kegiatan di BAPPEDA Provinsi Lampung secara umum diarahkan untuk mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Disisi yang lain, Bappeda sebagai perangkat daerah juga menyusun dokumen Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat informasi tentang realisasi kinerja serta anggaran dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, serta keterkaitannya dengan capaian dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2024.

Sebagai informasi penting, bahwa pada periode Tahun 2021 Provinsi Lampung masih melakukan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi di tengah terjadinya Pandemic Covid-19. Seiring dengan upaya Pemerintah Provinsi Lampung tersebut, BAPPEDA Provinsi Lampung juga telah melakukan beberapa penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.




1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.



Selaras dengan hal itu, tujuan disusunnya dokumen Evaluasi Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah untuk mengetahui progres/tingkat pencapaian kinerja dan keuangan pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 di lingkup Bappeda Provinsi Lampung, untuk kemudian dirumuskan langkah-langkah antisipatif agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dokumen evaluasi Renja ini juga disusun sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan dokumen Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Evaluasi Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021, proses penyusunan Evaluasi Renja, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Program prioritas RKPD dan Renstra Bappeda.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANTARA RENSTRA DAN DPA BAPPEDA TAHUN 2021

2.1 Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021

Berisikan Cascading dari RPMJD Provinsi Lampung sampai dengan Renstra BAPPEDA, Pohon Kinerja serta program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Lampung pada tahun 2021

2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan Bappeda tahun 2021 dengan Renstra BAPPEDA 2019-2024

Menguraikan kesesuaian program, pagu pendanaan, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

2.3 Kesesuaian Alokasi Pendanaan di DPA dan Renstra

Membandingkan antara anggaran yang terdapat pada Renstra dengan DPA Tahun 2021 yang di jelaskan dalam Program dan Kegiatan.

2.4 Perbandingan Indikator dan Target Kinerja Renstra dan DPA

Menguraikan kesesuaian indikator dan target kinerja Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

BAB III. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. LAMPUNG TAHUN 2021

3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021

Menguraikan tentang capaian kinerja keuangan dan kinerja output kegiatan dibandingkan dengan target Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun



2021 dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra

Mengemukakan capaian dan realisasi berdasarkan sasaran dan indikator sasaran strategis Bappeda Provinsi Lampung tahun 2021.

BAB IV. HAMBATAN DAN REKOMENDASI

Menguraikan resume umum tentang hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA tahun 2021 serta rekomendasi dalam pemecahan hambatan tersebut.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dari penyusunan dokumen Evaluasi Renja BAPPEDA Tahun 2021

Bab II. Perbandingan Program dan Kegiatan antara Renstra dan Renja

2.1 Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021

Mengacu pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik” dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.



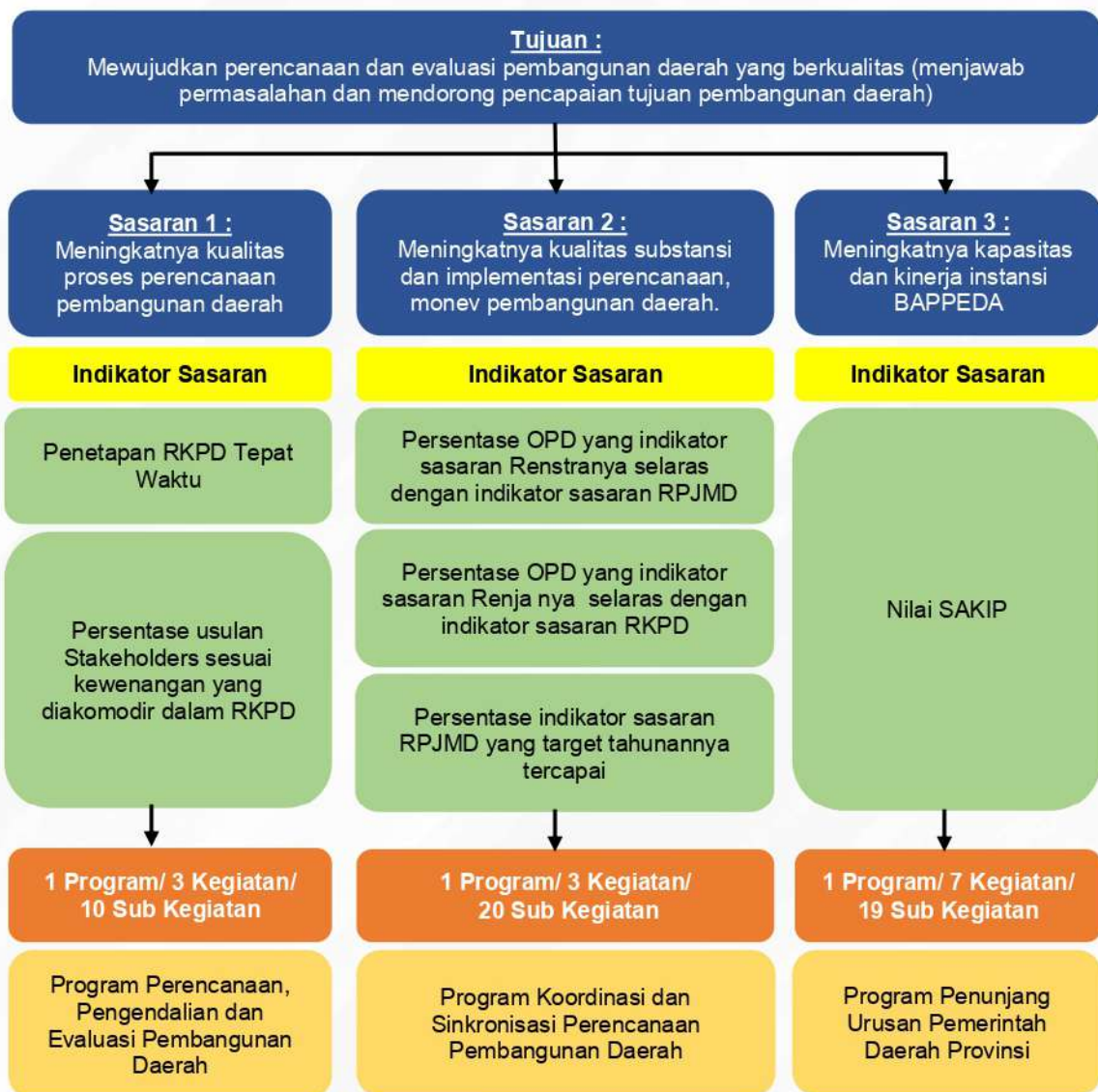
Gambar 2.1 : Indikator Kinerja Bappeda 2019-2024

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana

Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	30%	30%	31%	32%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A		



Gambar 2.2 Pohon Kinerja BAPPEDA

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan **3 Program, 13 Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatan** sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang APBD Provinsi Lampung T.A. 2021, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung T.A. 2021, serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung T.A. 2021;

Total alokasi anggaran Bappeda Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp. 30.731.065.182,-** (*Tiga Puluh Milyar, Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta, Enam Puluh Lima Ribu, Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri dari :

- Belanja Operasi	: Rp. 28.843.101.182,-
- Belanja Modal	: Rp. <u>1.887.964.000,-</u>
Total	: Rp. 30.731.065.182,-

Selanjutnya, dengan memperhatikan :

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 dan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- Instruksi Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kriteria Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Lampung.
- Instruksi Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

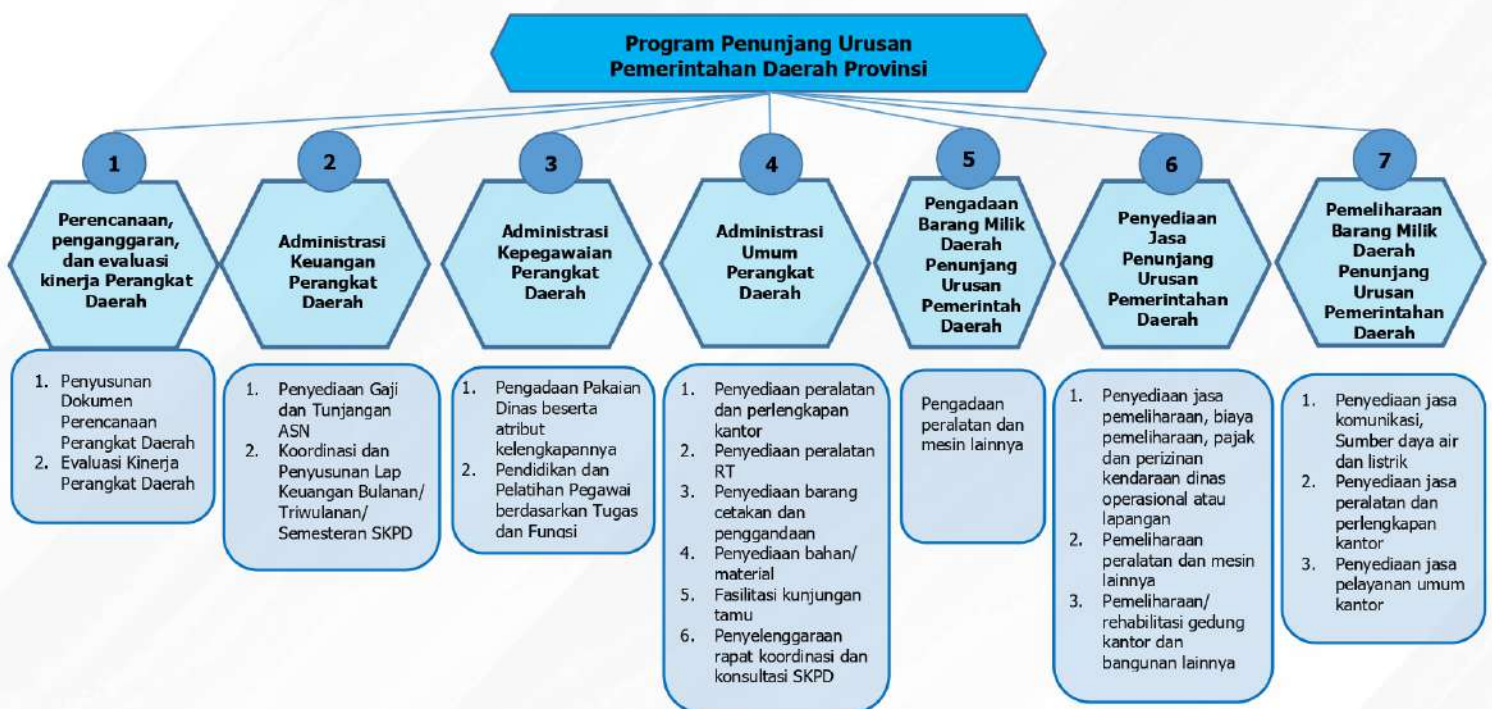
Lebih lanjut, dengan telah ditetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2021 tentang APBD Perubahan Provinsi Lampung T.A. 2021, Bappeda melaksanakan **3 Program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan** telah ditetapkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 31.982.150.950,-** (*Tiga Puluh Satu Milyar, Sembilan Ratus*

Delapan Puluh Dua Juta, Seratus Lima Puluh Ribu, Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari : **Belanja Operasi** sebesar Rp. 29.218.322.040,- dan **Belanja Modal** sebesar Rp. 2.763.828.910,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:

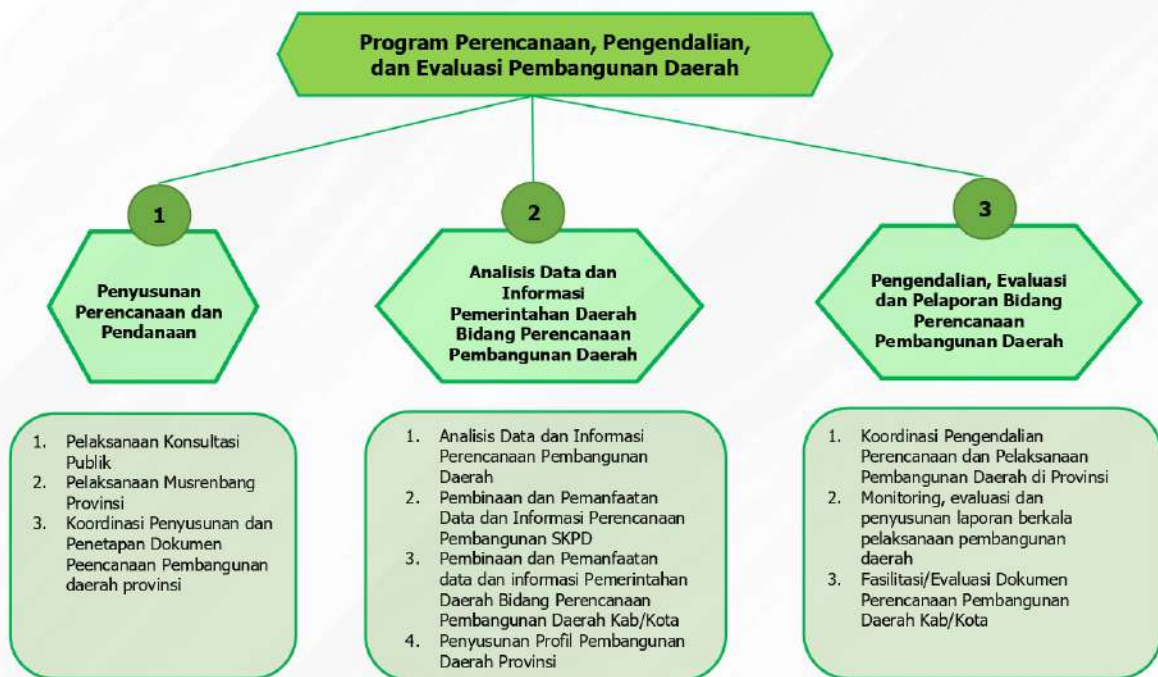


Gambar 2.3 : Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2021

Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Pendukung



Gambar 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Utama 1

**Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah**

1

**Koordinasi Perencanaan
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia**

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

2

**Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)**

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

3

**Koordinasi Perencanaan
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan**

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Gambar 2.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Utama 2

2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan BAPPEDA Renja Tahun 2021 dengan Renstra 2019-2024

Untuk mendukung Misi ke-2 dari RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 terdapat 2 Sasaran Strategis dan 1 Sasaran Pendukung dalam Renstra 2019-2024 BAPPEDA Provinsi Lampung yang diimplementasikan kedalam 3 Program, 10 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 terdapat dalam matrik program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Konsistensi Program, Kegiatan dan sub kegiatan antara RPJMD, RKPD dan Renstra diperkuat dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung.

Tabel 2.2 : Persandingan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021 dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2021	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
SASARAN UTAMA			
A	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
I	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Konsisten
2	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Konsisten
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Konsisten
II	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsisten
5	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Konsisten
6	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsisten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2021	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Konsisten
III Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
8	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Konsisten
9	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Konsisten
10	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsisten
B PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
IV Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
12	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
13	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsisten
14	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
15	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten
16	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsisten
V Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
17	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
18	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2021	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
20	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsisten
21	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
22	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Konsisten
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Konsisten
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Konsisten
VI	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
26	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Konsisten
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Konsisten
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsisten
29	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten
30	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Konsisten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2021	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
SASARAN PENDUKUNG			
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
VII	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
31	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Konsisten
32	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsisten
VIII	Kegiatan Administrasi Keuangan		
33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Konsisten
34	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Konsisten
IX	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
35	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Konsisten
36	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Konsisten
X	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
37	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsisten
38	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Konsisten
39	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Konsisten
40	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Konsisten
41	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsisten
42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsisten
XI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
43	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Konsisten
XII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Konsisten
45	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Konsisten
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Konsisten
XIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA 2019-2024	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2021	KETERANGAN/ STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Konsisten
48	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Konsisten
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Konsisten

2.3 Kesesuaian Alokasi Pendanaan di DPA dengan Renja

Pada tahun 2021, pagu anggaran Belanja pada DPA Perubahan Bappeda Provinsi Lampung sebesar Rp. 31.982.150.950,- sementara dalam Renja Perubahan tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 29.711.315.182,-.



Gambar 2.7 Pendanaan antara Renja dan DPA tahun 2021



Alokasi APBD Perubahan BAPPEDA Tahun 2021 berjumlah Rp. 31.982.150.950,- dengan Rincian Belanja Operasi Rp. 29.218.322.040,- dan Belanja Modal Rp. 2.763.828.910,-

Rincian alokasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Perbandingan Pendanaan di Renja dan DPA Tahun 2021

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN RENJA (Rp)	PAGU ANGGARAN DPA (Rp)	%
SASARAN UTAMA				
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.442.097.400	2.318.172.400	57,90
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.870.486.100	4.506.882.430	54,95
SASARAN PENDUKUNG				
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.398.731.682	25.157.096.120	122,24
	TOTAL	29.711.315.182	31.982.150.950	62,11

2.4 Perbandingan Indikator dan Target Kinerja antara Renstra dan DPA BAPPEDA Tahun 2021

Perencanaan Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2021 merupakan tahun ke-2 Periode RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dan Renstra Bappeda Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Secara singkat target kinerja antara Renstra dan DPA Bappeda Provinsi Lampung tahun 2021 dapat dilihat di tabel berikut

Tabel 2.4 Perbandingan Indikator dan Target Kinerja DPA dan Renja Bappeda Prov. Lampung Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	2.442.097.400	100%	2.318.172.400
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	1.087.946.500	100%	1.064.986.500
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasi terkait perencanaan	48 OPD	84.960.000	48 OPD	84.960.000
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	2 Kali	505.034.500	2 Kali	286.984.500
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD (Murni dan Perubahan)	3 Dokumen	497.952.000	3 Dokumen	693.042.000
2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100%	732.726.000	100%	732.726.000
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah keterisian E-Database n-1	70%	115.472.000	70%	115.472.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah informasi Geospasial untuk mendukung Satu Data dan Satu Peta Provinsi Lampung	50 Peta	253.814.000	50 Peta	253.814.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Kabupaten/ Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung	15 Kab/ Kota	97.846.000	15 Kab/ Kota	97.846.000
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah melalui Buku Profil, Website dan 2 Dashboard Statistik/ Informasi	6 Publikasi	265.594.000	6 Publikasi	265.594.000
3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100%	621.424.900	100%	620.459.900

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring	2 Dokumen	63.233.000	2 Dokumen	63.233.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Program serta Kegiatan APBD yang dimonitoring dan Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2022	3 Dokumen	330.260.500	3 Dokumen	274.295.500
	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Mumi dan RKPD Perubahan Kab/Kota	3 Dokumen	227.931.400	3 Dokumen	182.931.400
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100%	3.870.486.100	100%	4.506.882.430
4	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100%	1.388.493.500	100%	1.899.889.830
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	2 Dokumen	376.885.700	2 Dokumen	376.885.700
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Asistensi Perencanaan Terkait Pemerintahan	5 Dokumen	339.098.800	5 Dokumen	650.495.130
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Capaian TPB/ SDCs Tahun 2021 Provinsi Lampung	5 Dokumen	346.815.100	5 Dokumen	346.815.100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	1 Dokumen	39.861.200	1 Dokumen	39.861.200
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen	236.071.000	2 Dokumen	436.071.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	1 Dokumen	49.761.700	1 Dokumen	49.761.700
5	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	971.472.600	100%	1.021.472.600
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Daerah dan Buku Peluang Investasi	2 Dokumen	170.034.000	2 Dokumen	220.034.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung dan Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung	3 Laporan	128.908.000	3 Laporan	128.908.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Laporan Money dan Jumlah Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan)	5 Dokumen	235.643.000	5 Dokumen	235.643.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	172.945.700	2 Dokumen	172.945.700
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	44.098.000	4 Dokumen	44.098.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	3 Dokumen	86.580.000	3 Dokumen	86.580.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB	4 Dokumen	109.509.000	4 Dokumen	109.509.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	1 Laporan	23.754.900	1 Laporan	23.754.900
6	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	1.510.520.000	100%	1.585.520.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengembangan Wilayah	2 Dokumen	696.312.500	2 Dokumen	696.312.500
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	28.306.000	1 Dokumen	28.306.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	120.748.500	1 Dokumen	120.748.500
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kecipitakaryaan Provinsi Lampung	2 Dokumen	346.148.000	2 Dokumen	346.148.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	3 Dokumen	209.549.500	3 Dokumen	284.549.500
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	109.455.500	1 Dokumen	109.455.500

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN PENDUKUNG						
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Layanan administrasi perkantoran	100%	23.398.731.682	100%	25.157.096.120
7	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi perangkat daerah yang tepat waktu	100%	341.892.000	100%	366.677.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan, Renja RB)	11 Dokumen	195.296.000	13 Dokumen	200.281.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan, Evaluasi Renja RB)	9 Dokumen	146.596.000	11 Dokumen	166.396.000
8	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	14.035.221.132	100%	15.506.056.900
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunj. ASN	12 Bulan	13.932.797.132	12 Bulan	15.403.632.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	2 Dokumen	102.424.000	2 Dokumen	102.424.000
9	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100%	295.322.600	100%	290.134.600
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	150 Stel	120.150.000	164 Stel	191.900.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	40 Orang	175.172.600	40 Orang	98.234.600
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100%	5.755.416.600	100%	5.657.189.810
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	1.254.297.800	12 Bulan	2.194.127.210

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN		DPA PERUBAHAN	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	47.212.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	32.392.800	12 Bulan	39.740.090
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah layanan pengadaan ATK	12 Bulan	47.000.000	12 Bulan	70.719.710
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	12 Bulan	61.600.000	12 Bulan	78.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	300 Kali	4.350.126.000	350 Kali	3.227.390.800
11	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pertengkapan gedung kantor	100%	76.508.000	100%	141.385.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	28 Unit	76.508.000	44 Unit	141.385.000
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100%	2.012.917.000	100%	1.969.517.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	424.000.000	12 Bulan	424.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	62.675.000	12 Bulan	62.675.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan umum kantor	12 Bulan	1.526.242.000	12 Bulan	1.472.842.000
13	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100%	881.454.350	100%	1.236.135.810
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17 Unit	324.918.000	17 Unit	358.588.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	122 Unit	45.320.000	554 Unit	45.320.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Musholla + Ruang Laktasi dan Kamar Mandi LL I dan II	7 Paket	511.216.350	8 Paket	832.227.810

Bab III. Capaian Kinerja

3.1 Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa kesesuaian dan keselarasan antar dokumen menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja perencanaan pembangunan daerah. Kesesuaian dan keselarasan antar dokumen baik dokumen perencanaan maupun dokumen anggaran adalah hal yang penting diperhatikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik.

Kesesuaian dan keselarasan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja) dengan dokumen penganggaran Perangkat Daerah (DPA) juga menjadi indikator bahwa pelaksanaan kegiatan dalam DPA/APBD selalu dilandasi dengan perencanaan yang matang. Konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renja Perubahan Bappeda Provinsi Lampung dengan DPA Perubahan Bappeda Provinsi Lampung pada Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD/DPA Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN	APBD/DPA PERUBAHAN	KET
I	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	√	√	
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	√	√	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	√	√	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	√	√	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	√	√	
2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN	APBD/DPA PERUBAHAN	KET
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	√	√	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	√	√	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	√	√	
3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	√	√	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	√	√	
	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	√	√	
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	√	√	
4	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	√	√	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	√	√	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	√	√	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	√	√	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	√	√	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	√	√	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	√	√	
5	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	√	√	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	√	√	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	√	√	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	√	√	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	√	√	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	√	√	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN	APBD/DPA PERUBAHAN	KET
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	√	√	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	√	√	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	√	√	
6	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	√	√	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	√	√	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	√	√	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	√	√	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	√	√	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	√	√	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	√	√	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	√	√	
7	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
8	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	√	√	
9	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	√	√	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	√	
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN	APBD/DPA PERUBAHAN	KET
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	
	Penyediaan Bahan/Material	√	√	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
11	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
13	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	

3.2 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Anggaran Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2021

BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2021 melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021. Anggaran belanja pada Perubahan APBD sebesar Rp. 31.982.150.950,- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 29.252.044.398,- atau sebesar 91,46%.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2021, anggaran belanja terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 6.825.054.830,- dan Sasaran Pendukung Rp. 25.157.096.120,-. Anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran

pendukung tersebut lebih besar dari pada anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran utama. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur belanja, dimana pada Tahun 2021, terdapat 1 sub kegiatan yang didalamnya mengakomodir belanja gaji ASN yang sebesar Rp. 15.403.632.900,-



Gambar 3.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 99,49% dan realisasi anggaran mencapai 91,46%, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 49 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung pada Tahun 2021, terdapat 45 sub kegiatan yang tingkat capaian kerjanya mencapai 100% dan 4 Sub Kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 90,29% yakni sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Untuk melihat tingkat capaian anggaran selama tahun 2021 dapat di uraikan sebagai berikut:

Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Sesuai dengan diagram disamping, untuk sasaran utama ke 1, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp.2.318.171.900,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.139.871.900,- atau sebesar 92,31%. Program yang mendukung Sasaran Utama I tersebut adalah Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi daerah, yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 10 Sub dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



I. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1. Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasi terkait perencanaan dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD dengan tingkat capaian 100%;



Musrenhana RKPD 2022 dan Musrenhana Perubahan RPJMD

3. Jumlah Dokumen RKPD 2022, Dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan tingkat capaian 100%.

II. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah keterisian E-Database n-1 dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah Upload Informasi Geospasial Tematik pada Aplikasi Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah pembinaan Kabupaten/ Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100%.

III. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RKPD Tahun 2020 serta evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota dan Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD perubahan Kab/Kota dengan tingkat capaian 100%.

Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai dengan diagram dibawah ini, untuk sasaran utama ke 2, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 4.506.882.430,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.590.267.000,- atau sebesar 79,66% sementara untuk tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Ada 4 sub kegiatan yang tingkat capaian anggarannya kurang dari 50%, yaitu sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (49,6%), subkegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA (40,5%), subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (42,52%), subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (49,13%). Program yang mendukung Sasaran Utama 2 tersebut adalah Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



IV. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dan Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Dokumen Proceeding FGD di Bidang Pemerintahan, Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Dokumen Kajian Revitalisasi SMK Unggulan Terpadu, Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 dan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Jangka Menengah Tahun 2021-2024 dengan tingkat capaian 100%;



Pertemuan Aksi Kovergensi Stunting Provinsi Lampung

3. Jumlah Dokumen laporan SDG's Tahun 2020, Dokumen Laporan Monev Smart Village dan laporan monitoring evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (LP2KD, Laporan Grand Design Kependudukan, Laporan RAD PG) dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah dokumen proceeding FGD Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia dan Dokumen Penyusunan Masterplan Smart School dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev Bidang Pembangunan Manusia dengan tingkat capaian 100%;

V. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Buku Peluang Investasi dan Komoditi Unggulan Daerah dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Laporan pelaksanaan asistensi sektor penanaman modal, tenaga kerja, pendapatan dan keuangan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Buku Statistik Perekonomian dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Laporan FGD pengembangan pariwisata Provinsi Lampung dan Laporan FGD pengembangan kawasan industry dengan tingkat capaian 100%;



Penguncian Peta Peluang Investasi Kawasan Industri

5. Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta Perkebunan dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah dokumen Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB dengan tingkat capaian 100%.
8. Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Program Unggulan lingkup Industri dan Pariwisata dengan tingkat capaian 100%.

VI. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;



Regional Meeting IPDMIP Tahun 2021

2. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;

4. Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Kewilayahan dan Dokumen Kebijakan KLHS pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen pelaporan Asistensi PD di Bidang Kewilayahan, Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Gas Rumah Kaca (PEP GRK) dan Dokumen Kajian Catchment Area Batu Tegidengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%.

Sasaran Pendukung : Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi Bappeda.

Sesuai dengan diagram dibawah ini, untuk sasaran pendukung, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 25.157.096.930,- dapat terealisasi sebesar Rp. 23.521.905.498,- atau sebesar 93,50%. Ada 1 sub kegiatan yang tingkat capaian anggarannya belum mencapai 60%, yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (54,71%). Program yang mendukung Sasaran Pendukung tersebut adalah Program penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



VII. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen perencanaan (Perubahan Renstra, Renja Murni (n+1), Perubahan Renja (Tahun n), RKT, RKA Murni dan Perubahan RKA, DPA Murni dan Perubahan DPA, Rencana Aksi, PK Murni, Perubahan PK), Roadmap RB, Renja RB dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra (Paruh Waktu/ 2020), Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan), Evaluasi Renja RB, Laporan Bulanan LRFK dengan tingkat capaian 100%.

VIII. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


1. Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan PD (semesteran dan tahunan) dengan tingkat capaian 100%.

IX. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi dengan tingkat capaian 97,5%.

X. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah layanan pengadaan ATK dengan tingkat capaian 100%;

- 
5. Jumlah layanan makan minum dengan tingkat capaian 100%;
 6. Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan dengan tingkat capaian 90,29%.

XI. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100%.

XII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor dengan tingkat capaian 100%.

XIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 94,12%;
2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 93,14%;
3. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan tingkat capaian 100%.




3.3 Capaian Kinerja Sasaran Renstra

Pelaksanaan pengukuran kinerja instansi pemerintah tidak terkecuali Bappeda Provinsi Lampung dilakukan sesuai dengan aturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Agar peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah dapat diukur maka Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, kinerja utama dapat diakomodir dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU dijadikan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung selalu ditingkatkan setiap tahunnya, Indikator Kinerja Utama juga dilakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Berdasarkan RPJMD 2019-2024, Bappeda Provinsi Lampung memiliki capaian 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung, diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian 3 (tiga) kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Lampung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Penetapan RKPD sesuai target yang ditetapkan.
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	23,92%	79,73%	Diukur berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD 2022 sebanyak 201 usulan dari 840 total usulan awal.
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100 %	100%	100%	Target telah dicapai dimana indikator sasaran Renstra PD telah selaras dengan indikator sasaran pada Perubahan RPJMD 2019-2024
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100 %	100 %	100%	Target telah tercapai berdasarkan indikator sasaran Renja PD sebanyak 1.951 telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	85%	85%	100%	Target telah terpenuhi, dimana sebanyak 85% atau 17 indikator dari 20 Indikator
SASARAN PENDUKUNG						
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	BB	100%	Penilaian nilai SAKIP 2020 berdasarkan LHE dari Inspektorat dilaksanakan pada awal Tahun 2021

Keterangan : * = masih dalam tahap perhitungan

Dari 5 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, kinerja yang telah mencapai 100% sebanyak 3 indikator, sementara 2 indikator lainnya masing-masing mencapai nilai 79,73% dan 53%. Sementara 1 indikator pendukung telah mencapai 100%.

Secara umum BAPPEDA Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 5 (lima) indikator sasaran utama dan 1 (satu) indikator sasaran pendukung.

Dari 5 indikator sasaran utama, sebanyak 4 indikator memiliki capaian 100%. Hal ini berdampak atau berimplikasi pada perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin baik. Terutama pada indikator Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD, indikator tersebut memiliki capaian 100% yang mengindikasikan bahwa program yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah selaras dengan rencana strategis Perangkat Daerah yang melaksanakan program prioritas tersebut. Hal ini juga dibuktikan pada indikator Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan tingkat capaian 100% yang mengindikasikan bahwa program kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah juga telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga perangkat daerah melaksanakan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimuat pada rencana kerja tahunan atau RKPD.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sasaran utama dan sasaran pendukung dan sebanyak 6 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2019-2024, Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi : Forum Gabungan SKPD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan se- wilayah Sumatera. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu :

1. Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
2. Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%;




Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

- a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini




dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD mengacu pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.



Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik yaitu kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2021, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap rencana pembangunan di daerah tidak tekecuali di Provinsi Lampung.

Meskipun Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas dalam penyusunan RKPD tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait. Begitu pun penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Lampung Tahun 2022 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 Provinsi Lampung merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025.

Kompleksitas tahapan penyusunan RKPD terkait indikator sasaran Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan pencapaian target 100% merupakan suatu pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dalam bidang perencanaan pembangunan karena pada hakikatnya perencanaan pembangunan yang baik memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu spesifik, terukur dan tepat waktu. Pencapaian target indikator ini secara konsisten diraih sejak tahun pertama periode RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Unsur ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk



Konsultasi publik penyusunan RKPD 2022

meminimalkan berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di eksternal lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai target ini tersebut melalui pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan RKPD antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Indikator sasaran 1.b adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%. Adapun realisasinya adalah sebesar 23,92% atau dengan persentase terhadap target sebesar 79,73%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Masyarakat; dan 2) Usulan Pokir DPRD.



Usulan pokok pikiran DPRD merubakan bagian proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2022.

Pada tahun 2020, capaian indikator adalah sebesar 98.16%, penurunan capaian ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga pemerintah fokus terhadap kegiatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sebagaimana diketahui, tahun 2022 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024 merupakan momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah. Disatu sisi, untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun dengan mencermati capaian pembangunan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, seperti yang saat ini kita hadapi adanya wabah pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh tatanan kehidupan sosial dan ekonomi

masyarakat. Disisi yang lain, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran 1 antara lain:

- Usulan belum memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Substansi usulan program/ kegiatan belum selaras dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
- Volume usulan belum disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- Data dukung dari usulan program/ kegiatan belum dapat memberikan informasi yang lengkap.

Kedepan, dalam rangka mengoptimalkan peran aktif stakeholder pembangunan kiranya dilakukan sosialisasi tentang mekanisme penyampaian usulan kepada Stakeholder terkait.

2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Indikator kinerja sasaran 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
2. Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 100%.

Indikator sasaran 2.a adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasinya adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%. Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mendorong seluruh PD sudah selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) sehingga Sub Kegiatan diluar aplikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.



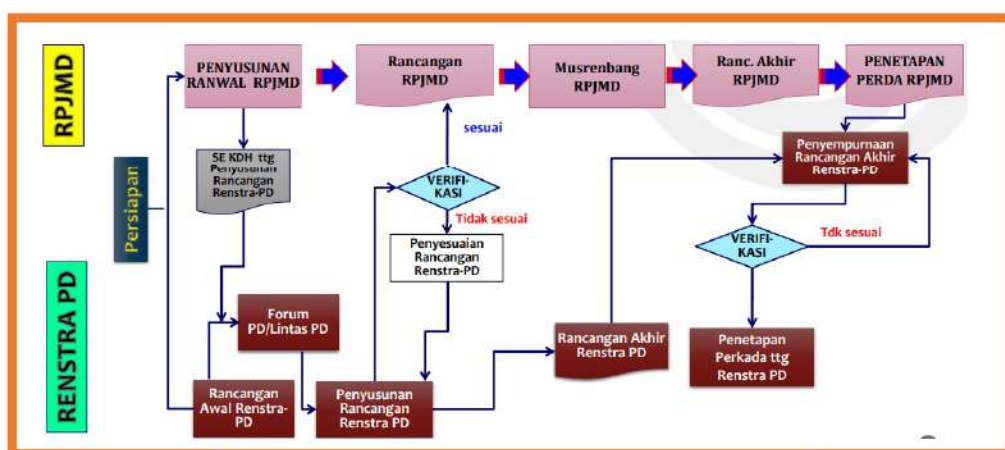
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Seperti diketahui Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan OPD, Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Dengan kata lain, Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).



Keterkaitan RPJMD dengan Restra OPD

Indikator Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD 100% yang diraih Bappeda Provinsi Lampung pada tahun 2020 dan 2021 merupakan implikasi dari keberhasilan perencanaan

pembangunan di Provinsi Lampung, dengan adanya keselarasan renstra perangkat daerah dan RPJMD maka dapat memudahkan pencapaian target pembangunan pimpinan daerah yang di rumuskan dalam periode RPJMD.



Desk Perubahan Restra PD 2019-2024

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 melakukan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, sejalan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Lampung mendorong seluruh OPD agar indikator Renstranya selaras terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) sehingga Sub Kegiatan diluar aplikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.



Indikator sasaran 2.b adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar

100%, dimana 1.951 indikator sasaran Renja PD telah selaras dengan RKPD.

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja - OPD). Rencana Kerja-OPD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra OPD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Provinsi sesuai dengan bidang urusan OPD.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra OPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD. Oleh karena itu penyelarasan indikator renja OPD dengan RKPD merupakan suatu keharusan agar capaian pembangunan yang tertuang dalam target indikator pembangunan dapat direalisasikan.



Desk Renja OPD Tahun 2022

Dalam dua tahun terakhir (2020 dan 2021), Bappeda Provinsi Lampung berhasil menyelaraskan indikator renja OPD dengan indikator RKPD dengan tingkat capaian 100% atau dengan kata lain seluruh indikator renja OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung sudah selaras dengan indikator RKPD Provinsi Lampung. Hal ini juga memberikan *impact* terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin baik. Dengan adanya keselarasan indikator renja OPD dan RKPD maka target pembangunan yang tertuang dalam renjana kerja tahunan dapat lebih mudah dicapai dan lebih mudah diukur. Upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi Lampung dalam menjaga keselarasan indikator Renja OPD dengan indikator RKPD melalui kegiatan desk renja OPD secara intensif dengan OPD terkait.

Indikator sasaran 2.c adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 85% atau sebanyak 17 indikator dari 20 indikator yang ditargetkan mencapai 100%. Adapun realisasi sampai dengan Bulan Februari tahun 2022, sebanyak 17 indikator sudah tercapai dengan tingkat capaian diatas 95% sehingga realisasi capaian adalah sebesar 100%.



Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja daerah Provinsi Lampung dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah per urusan dalam RKPD Provinsi ditetapkan berdasarkan IKU dan IKD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Target IKU dan IKD Provinsi Evaluasi hasil Pelaksanaan RPJMD dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD selama periode 2019-2024, tingkat pencapaian indikator kinerja utama tersebut pertahun merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan.

Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang target



FGD indikator pembangunan PRPJMD 2019-2022



Konsultasi publik PRPJMD 2019-2022

tahunannya tercapai di tahun 2020 adalah sebesar 64%, dibandingkan dengan tahun 2021 tingkat capaian ini naik menjadi 100%. Peningkatan capaian ini tidak lepas dari keberhasilan BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai

leading sector penyelesaian dokumen Perubahan RPJMD dimana jumlah indikator pembangunan dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 yang semula berjumlah 33 (tiga puluh tiga) menjadi 20 (dua puluh), 20 indikator pembangunan dalam PRPJMD telah disesuaikan dengan dinamika ekonomi nasional dan Provinsi Lampung terutama setelah terimbas dampak pandemi COVID-19. Selain itu, keberhasilan ini juga seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh positif pasca pandemi sehingga berdampak positif pula terhadap capaian indikator makro pembangunan di Provinsi Lampung.


3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2021 yaitu predikat "BB". Adapun realisasi kinerja nya telah mencapai target 100%, karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD pada awal Tahun 2021.






Bab IV. Hambatan dan Rekomendasi





4.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa pada awal periode Tahun 2021 pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang “Pemulihan Ekonomi Nasional” dimasa (pasca) Pandemic Covid-19 serta pentingnya mensukseskan “Program Vaksinasi Nasional”, yang secara regulasi telah ditindaklanjuti dengan dukungan fiskal berupa “Re-Alokasi APBN maupun APBD T.A. 2021”. Sebagai konsekuensinya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program dan kegiatan.

Namun secara prinsip keadaan tersebut tidak menimbulkan hambatan berarti dalam pelaksanaan tugas pokok BAPPEDA sebagai lembaga yang menjalankan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian, terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi dan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra, antara lain :


1. Pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK); namun kondisi lingkungan eksternal di masa pandemic Covid-19 yang telah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang **harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan**. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan.
2. Pada aspek pelaksanaan, dengan adanya kebijakan dan regulasi pemerintah maka secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan

- 
- kegiatan bagi pengelola kegiatan. Namun hal tersebut tidak berdampak pada pencapaian output yang telah ditetapkan dari masing-masing sub kegiatan.
3. Memperhatikan kebijakan realokasi anggaran (rasionalisasi anggaran) yang ditempuh oleh pemerintah di masa pandemic, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian (mengurangi) jumlah *output*, yang secara logis akan berpengaruh terhadap capaian dari target *output* yang telah ditetapkan.



4.2 Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021.

1. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisasikannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;
2. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola sub kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
3. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
4. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);

- 
5. Ditengah kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang belum stabil, pengelola sub kegiatan perlu senantiasa memperkuat kemampuan manajerial dan kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan substantif.




Bab V. Penutup

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung atas capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK). Secara umum capaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 telah tercapai dengan baik dan tidak ditemukan hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Selain sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung, penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung juga dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder) dalam hal pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung

Demikian Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat, guna peningkatan BAPPEDA Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.



Lampiran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
1	5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Revisi Renstra, Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK	41	1.403.902.500,00	0	0	13	200.281.000,00	13	199.468.000,00	100	99,59	13	199.468.000,00	31,71	14,21	
2	5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan)	36	1.276.275.000,00	0	0	11	166.396.000,00	11	165.307.000,00	100	99,35	11	165.307.000,00	30,56	12,95	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
3	5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48	59.911.027.667,00	0	0	12	15.403.632.900,00	12	15.071.992.837,00	100	97,85	12	15.071.992.837,00	25	25,16	
4	5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	8	1.148.647.500,00	0	0	2	102.424.000,00	2	100.525.000,00	100	98,15	2	100.525.000,00	25	8,75	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
5	5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	600	638.137.500,00	0	0	164	191.900.000,00	164	191.900.000,00	100	100	164	191.900.000,00	27,33	30,07	
6	5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	120	1.990.989.000,00	0	0	40	98.234.600,00	39	96.404.774,00	97,5	98,14	39	96.404.774,00	32,5	4,84	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
7	5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	240	4.211.707.500,00	0	0	12	2.194.127.210,00	12	2.189.796.319,00	100	99,8	12	2.189.796.319,00	5	51,99	
8	5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	48	178.678.500,00	0	0	12	47.212.000,00	12	47.044.500,00	100	99,65	12	47.044.500,00	25	26,33	
9	5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	48	306.306.000,00	0	0	12	39.740.900,00	12	38.884.900,00	100	97,85	12	38.884.900,00	25	12,69	
10	5.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah layanan pengadaan ATK	48	331.831.500,00	0	0	12	70.719.710,00	12	70.699.850,00	100	99,97	12	70.699.850,00	25	21,31	
11	5.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan minum	48	229.729.500,00	0	0	12	78.000.000,00	12	58.760.000,00	100	75,33	12	58.760.000,00	25	25,58	
12	5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	600	3.573.570.000,00	0	0	350	3.227.390.800,00	316	2.839.508.157,00	90,29	87,98	316	2.839.508.157,00	52,67	79,46	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
13	5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	2.552.550.000,00	0	0	44	141.385.000,00	44	141.379.500,00	100	100	44	141.379.500,00	44	5,54	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
14	5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	48	3.165.162.000,00	0	0	12	424.000.000,00	12	262.763.716,00	100	61,97	12	262.763.716,00	25	8,3	
15	5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja	48	332.831.500,00	0	0	12	62.675.000,00	12	52.565.000,00	100	83,87	12	52.565.000,00	25	15,79	
16	5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan	48	3.253.600.000,00	0	0	12	1.472.842.000,00	12	805.815.600,00	100	54,71	12	805.815.600,00	25	24,77	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
17	5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56	2.042.040.000,00	0	0	17	358.588.000,00	16	313.050.345,00	94,12	87,3	16	313.050.345,00	28,57	15,33
18	5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	200	382.882.500,00	0	0	554	45.320.000,00	516	45.160.000,00	93,14	99,65	516	45.160.000,00	258	11,79
19	5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	3.455.131.600,00	0	0	8	832.227.810,00	8	830.880.000,00	100	99,84	8	830.880.000,00	66,67	24,05
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																	
20	5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasi terkait perencanaan	192	816.816.000,00	0	0	48	84.960.000,00	48	76.407.800,00	100	89,93	48	76.407.800,00	25	9,35
21	5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD	4	3.318.315.000,00	0	0	2	286.984.500,00	2	262.599.898,00	100	91,5	2	262.599.898,00	50	7,91
22	5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD (Murni dan perubahan) dan dokumen revisi RPJMD 2019-2024	10	3.031.530.000,00	0	0	3	693.042.000,00	3	653.552.902,00	100	94,3	3	653.552.902,00	30	21,56
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																	
23	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah keterisian E-Database n-1	280	3.003.060.000,00	0	0	70	115.472.000,00	70	98.412.000,00	100	85,23	70	98.412.000,00	25	3,28
24	5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Upload Informasi Geospasial Tematik pada Aplikasi Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung	200	757.482.000,00	0	0	50	253.814.000,00	50	243.058.200,00	100	95,76	50	243.058.200,00	25	32,09
25	5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Kabupaten/ Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung	60	1.021.020.000,00	0	0	15	97.846.000,00	15	97.772.000,00	100	99,92	15	97.772.000,00	25	9,58
26	5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah melalui Website, Pameran, Buku Profil, Panel Display, Dashboard (2 buah)	24	1.786.785.000,00	0	0	6	265.594.000,00	6	248.321.400,00	100	93,5	6	248.321.400,00	25	13,9
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																	
27	5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring	8	1.021.020.000,00	0	0	2	63.233.000,00	2	20.390.000,00	100	32,25	2	20.390.000,00	25	2
28	5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RKPd Tahun 2020 dan evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024	12	3.573.570.000,00	0	0	3	274.295.000,00	3	267.675.300,00	100	97,59	3	267.675.300,00	25	7,49
29	5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPd dan RKPd Perubahan Kab/ Kota	12	2.042.040.000,00	0	0	3	182.931.400,00	3	171.682.400,00	100	93,85	3	171.682.400,00	25	8,41
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																	

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
30	5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dan Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	4	1.786.785.000,00	0	0	2	376.885.700,00	2	372.662.200,00	100	98,88	2	372.662.200,00	50	20,86
31	5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat	4	765.765.000,00	0	0	5	650.495.130,00	5	497.877.800,00	100	76,54	5	497.877.800,00	125	65,02
32	5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen laporan SDG's Tahun 2020, Dokumen Laporan Monev Smart Village dan laporan monitoring evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (LP2KD, Laporan Grand Design Kependudukan, Laporan RAD PG)	4	1.276.275.000,00	0	0	5	346.815.100,00	5	345.357.600,00	100	99,58	5	345.357.600,00	125	27,06
33	5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia	4	2.807.805.000,00	0	0	1	39.861.200,00	1	39.566.200,00	100	99,26	1	39.566.200,00	25	1,41
34	5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Strategis Daerah Penanganan Anak Putus Sekolah dan dokumen proceeding FGD Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia	4	765.765.000,00	0	0	2	436.071.000,00	2	435.138.000,00	100	99,79	2	435.138.000,00	50	56,82
35	5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev Bidang Pembangunan Manusia	4	1.276.275.000,00	0	0	1	49.761.700,00	1	49.614.200,00	100	99,7	1	49.614.200,00	25	3,89
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																	
36	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Buku Peluang Investasi	4	1.786.785.000,00	0	0	2	220.034.000,00	2	146.906.400,00	100	66,77	2	146.906.400,00	50	8,22
37	5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan pelaksanaan asistensi/ FGD di Bidang Perekonomian	4	765.765.000,00	0	0	3	128.908.000,00	3	73.923.000,00	100	57,35	3	73.923.000,00	75	9,65
38	5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Buku Statistik Perekonomian	4	1.276.275.000,00	0	0	5	235.643.000,00	5	165.845.000,00	100	70,38	5	165.845.000,00	125	12,99
39	5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinerjitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan FGD pengembangan pariwisata Provinsi Lampung dan Laporan FGD pengembangan kawasan industri	4	1.276.275.000,00	0	0	2	172.945.700,00	2	85.772.900,00	100	49,6	2	85.772.900,00	50	6,72

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5			
40	5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dan perkebunan	4	1.786.785.000,00	0	0	4	44.098.000,00	4	33.520.600,00	100	76,01	4	33.520.600,00	100	1,88		
41	5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan	4	765.765.000,00	0	0	3	86.580.000,00	3	35.064.000,00	100	40,5	3	35.064.000,00	75	4,58		
42	5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di sektor pertanian, Perkebunan, kelautan dan perikanan dan Dokumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Impelementasi KPB	4	1.276.275.000,00	0	0	4	109.509.000,00	4	77.501.000,00	100	70,77	4	77.501.000,00	100	6,07		
43	5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Program Unggulan lingkup Industri dan Pariwisata	4	1.276.275.000,00	0	0	1	23.754.900,00	1	18.141.400,00	100	76,37	1	18.141.400,00	25	1,42		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah																			
44	5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP yang menjadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	4	1.786.785.000,00	0	0	2	696.312.500,00	2	583.888.000,00	100	83,85	2	583.888.000,00	50	32,68		
45	5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	4	1.276.275.000,00	0	0	1	28.306.000,00	1	12.036.000,00	100	42,52	1	12.036.000,00	25	0,94		
46	5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4	765.765.000,00	0	0	1	120.748.500,00	1	114.905.000,00	100	95,16	1	114.905.000,00	25	15,01		
47	5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Kewilayahan dan Dokumen kebijakan KLHS revisi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	4	2.552.550.000,00	0	0	2	346.148.000,00	2	281.414.200,00	100	81,3	2	281.414.200,00	50	11,02		
48	5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan dan Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan GRK	4	765.765.000,00	0	0	3	284.549.500,00	3	139.811.000,00	100	49,13	3	139.811.000,00	75	18,26		
49	5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	4	1.276.275.000,00	0	0	1	109.455.500,00	1	81.322.500,00	100	74,3	1	81.322.500,00	25	6,37		
Rata-Rata capaian kinerja %									31.982.151.260,00		29.252.044.398,00		99,49	91,46			47,59	17,25	
												Predikat kinerja		sangat tinggi	sangat tinggi			Sangat Renda	Sangat Renda